

komitmen dalam pembangunan jalan dan kesesuaian kondisi jalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan permasalahan pada uraian diatas peneliti tertarik untuk dilakukannya penelitian secara kompherensif megenai permasalahan terkait melauai judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Subang” dengan menggunakan teori menurut George C. Edwards III yang dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan dengan faktor yang dapat diukur kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan.

1.2 Fokus Penelitian

Maka peneliti memfokuskan penelitian dengan menggunakan teori kebijakan dari George C. Edwards III mencakup 4 faktor yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Subang oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan Di Kabupaten Subang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis diharapkan dari temuan penelitian ini. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh dan bagi pengembangan Ilmu

Administrasi Negara umumnya, khususnya mengenai implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Subang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terutama instansi yang terkait. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur jalan Di Kabupaten Subang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi literatur yang telah diterbitkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan temuan penelitian dari para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan topik penelitian. Manfaat kajian pustaka termasuk peningkatan pengetahuan peneliti mengenai topik, identifikasi celah dalam penelitian sebelumnya, pengembangan teori yang lebih luas dan tepat, serta peningkatan kualitas penelitian dengan berlandaskan pada sumber yang terpercaya dan valid. Dalam konteks penelitian, kajian pustaka dijadikan langkah pertama untuk memahami topik dan menemukan literatur yang relevan.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan acuan dasar dalam penyusunan penelitian. Peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai referensi dan pendukung untuk kegiatan penelitian serupa. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

1. Peneliti Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, dan Maulida Putri Rahmawati (2023)

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu bawasanya penelitian Penelitian Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, dan Maulida Putri Rahmawati yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenherjo)” penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena pada penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku atau perilaku yang dapat diamati oleh peneliti. Pada pendekatan deskriptif kualitatif kita dapat mengumpulkan data-data yang terdiri dari kata-kata, gambar, dan bukan yang terkait dengan angka-angka (Moleong, 2002). karena haal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif pada penelitian ini. sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Langenharjo, Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah motode kualitatif. Menurut teori Edward III yang mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:(1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi dan; (4) struktur birokrasi. Empat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengoperasian jalan-jalan di Kelurahan Langenharjo selesai setelah menyatakan bahwa persyaratan untuk operasi normal terpenuhi Secara teknis jalur administrasi. dengan ramah Manajemen Kepatuhan Manajemen peralatan jalan, kondisi jalan, Tingkat jalan, kepemilikan properti ruang tanah File jalan, kaki jalan raya, dan lingkungan. Instansi yang bertanggung jawab Perawatan, pemeliharaan dan pemeliharaan pemeliharaan jalan di Kelurahan Langenharjo adalah, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas PUPR (Bina Marga). Dinas PUPR juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Adanya Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan. Fungsi jalan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, jika terjadi kerusakan jalan maka akan berdampak pada mobilitas masyarakat. Penyebab kerusakan jalan dapat bervariasi. Hal yang memprihatinkan bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi, jika pengawasan jalan dilakukan dengan baik dan rutin. Selain itu setiap muncul kerusakan pada jalan, pemerintah setempat langsung menindaklanjutinya dengan cara pemeliharaan yang baik.

Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, dan Maulida Putri Rahmawati yaitu terletak pada lokus penelitian. Lokus peneliti Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, dan Maulida Putri Rahmawati berada pada Kelurahan

Langenharjo di Kabupaten Kendal dengan kasus kerusakan jalan di Kelurahan Langenharjo sedangkan peneliti yang sedang dilakukan berfokus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang.

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian Riki Satia Muharam dan Budiman Rusli yaitu terletak pada fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Serta persamaan lainnya pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

2. Peneliti Is Susanti, Achmad Aminudin, dan Sugeng Suharto (2021)

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu bawasanya penelitian Is Susanti, Achmad Aminudin, dan Sugeng Suharto (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu: Studi Tentang Slogan Seribu Jalan Mulus” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif. Fokus Penelitian adalah implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Kota Bengkulu. Aspek Penelitian adalah penetapan tujuan atau sasaran kebijakan, kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan. Tempat Penelitian yaitu Kota Bengkulu. Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan Penelitian adalah Pemerintah Kota Bengkulu yaitu 1 orang Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Untuk mewakili setiap kecamatan di Kota Bengkulu dipilih 18 orang masyarakat pengguna jalan, yaitu 9 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Kemudian peneliti juga mewawancarai 1 orang tokoh masyarakat yakni Walikota Bengkulu periode 2013-2018.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan lokus penelitiannya di Kota Bengkulu. Aspek yang digunakan mengadopsi Teori Van Mater dan Van Horn yakni penetapan tujuan atau sasaran kebijakan, kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat masih mengeluhkan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Terkait penetapan tujuan atau sasaran kebijakan masih dinilai belum objektif karena lebih mendahulukan jalan yang berada di dekat pusat kota dibandingkan jalan di pinggiran kota yang membahayakan ketika tidak dibangun, kemudian ada pula fenomena jalan tak bertuan (jalan yang tidak jelas statusnya menjadi tanggungjawab provinsi atau Kota Bengkulu). Untuk kegiatan pencapaian tujuan masyarakat berharap dilibatkan pada proses pembangunan infrastruktur jalan, tidak ada musyawarah antara pemerintah dan warga sekitar lokasi pembangunan yang dilakukan sebelum melakukan pembangunan jalan, masyarakat hanya menjadi penonton yang bahkan tidak bisa menjalankan perannya sebagai warga negara untuk turut mengawasi jalannya kebijakan. Hasil kegiatan dinilai masih kurang karena beberapa titik jalan masih belum dibangun dengan sistem ruas tuntas sehingga menimbulkan pemikiran masyarakat bahwa pemerintah hanya melakukan “pencitraan”.

Adanya implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota

Bengkulu ini dapat melakukan kajian terhadap implementasi pembangunan infrastruktur jalan maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan program ini di lapangan. Ketika hasilnya didapatkan, maka kebaikannya diharapkan menjadi contoh untuk pemerataan pembangunan di kabupaten lain dan hasil negatif dapat masuk kedalam rangkaian evaluasi kebijakan sehingga dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Is Susanti, Achmad Aminudin, dan Sugeng Suharto yaitu lokus penelitian dan teori yang digunakan. Lokus peneliti Is Susanti, Achmad Aminudin, dan Sugeng Suharto yaitu pada pemerintah dan masyarakat Kota Bengkulu sedangkan peneliti yang sedang dilakukan berfokus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang. Sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah teori menurut Edward III.

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian Riki Satia Muharam dan Budiman Rusli yaitu terletak pada fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Serta persamaan lainnya pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

3. Peneliti Ibnu Thosin Hidayatul Alim, Yusuf Hariyako, dan Anggraeny Puspaningtyas (2022)

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu bawasanya penelitian Peneliti Ibnu Thosin Hidayatul Alim, Yusuf Hariyako, dan Anggraeny Puspaningtyas yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten

Lamongan” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maknanya data yang dikumpulkan berasal dari observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui observasi untuk menggambarkan dan mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan atau pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan, Oleh karena itu, peneliti memfokuskan untuk meneliti implementasi dari kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang terdapat di Kabupaten Lamongan melalui Teori Model Edward III (1984:10) dengan mengajukan empat faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan diantaranya, faktor komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan), disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di 2 tempat, yakni di Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan yang terletak di Jalan Mastrip No. 61, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan serta mengamati langsung implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Indikator faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan sudah berjalan optimal dengan adanya sosialisasi kebijakan menjadi kunci suatu komunikasi yang disampaikan selain kepada pelaksana kebijakan juga kepada

kelompok sasaran kebijakan, yakni utamanya masyarakat Lamongan. Indikator faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan (anggaran) dan sumber daya peralatan bisa dikatakan berjalan secara optimal dan akuntabilitas. Ketiga unsur dari sumber daya sangat berkaitan dan bergantung satu sama lain. Indikator faktor disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan sudah cukup berhasil dengan kemauan yang kuat oleh para pelaksana kebijakan untuk mendorong kebijakan tersebut merata di semua ruas yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta dampak dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat Lamongan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang memadai.

Adanya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini memastikan bawasanya Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik itu di pusat maupun di daerah. Untuk itu peneliti meneliti keberadaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan dapat berjalan efektif dan efisien.

Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Thosin Hidayatul Alim, Yusuf Hariyako, dan Anggraeny Puspaningtyas yaitu terletak pada lokus penelitian. Pada penelitian Ibnu Thosin Hidayatul Alim, Yusuf Hariyako, dan Anggraeny Puspaningtyas yaitu berada pada pemerintah dan

masyarakat Kabupaten Lamongan, sedangkan peneliti yang sedang dilakukan berfokus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang.

Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian Ibnu Thosin Hidayatul Alim, Yusuf Hariyako, dan Anggraeny Puspaningtyas yaitu terletak pada fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Serta persamaan lainya pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, dan Maulida Putri Rahmawati (2023)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan Di Kelurahan Langenherjo)	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada teori dengan menggunakan teori dari Edward III, Fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada lokus penelitian.
2.	Is Susanti, Achmad Aminudin, dan Sugeng Suharto (2021)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu: Studi Tentang Slogan Seribu Jalan Mulus	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada lokus penelitian dan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori dari Van Mater dan Van Horn.

3.	Peneliti Ibnu Thosin Hidayatul Alim, Yusuf Hariyako, dan Anggraeny Puspaningtyas (2022)	Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan	Persamaan pada penelitian ini yaitu pada teori dengan menggunakan teori dari Edward III, Fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada lokus penelitian.
			pembangunan infrastruktur jalan dan menggunakan metode kualitatif.	

Sumber: Peneliti (2025)

Dari table diatas terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan karena lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang dan teori yang digunakan yaitu teori dari Edward III. Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan murni atau *original* tidak plagiat.

2.1.2 Konsep Administrasi Publik

Pengertian administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan segala sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dalam arti sempit berarti kegiatan tata usaha kantor, seperti mencatat, mengetik, mengirim, menghimpun, menggandakan, dan lain-lain. Hal ini berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien.

Administrasi dalam arti luas melibatkan kerja sama antar orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputi berbagai bidang seperti organisasi, manajemen, kebijakan, hubungan antar manusia, dan lain-lain.

Dalam pengertian ini, administrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan kantor, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan organisasi (Agustiandini, 2023).

Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Dalam pengertian yang lebih luas, administrasi mencakup seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan Bersama (Agustiandini, 2023).

Administrasi publik didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan aktivitas yang terkait dengan pengelolaan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Secara spesifik, administrasi publik termasuk tugas-tugas teknis seperti pencatatan, pengetikan, pengiriman, pengumpulan, penggandaan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, administrasi publik melibatkan semua proses kerja sama antara dua individu atau lebih dalam mencapai tujuan bersama, dengan menggunakan fasilitas dan infrastruktur khusus secara efektif dan efisien (Agustiandini, 2023). Menurut Woodrow Wilson (2012 :21) dalam buku Wirman Syafri administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena

tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat (Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) & FIA-Universitas Brawijaya, 2024).

Adapun beberapa pendapat tentang administrasi menurut para ahli: Menurut Ulbert Silalahi: Pengertian administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali, baik sebagian maupun menyeluruh (Agustiandini, 2023).

Disisi lain Sondang Siagian (2012:13) juga berpendapat mengenai administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Agustiandini, 2023).

Administrasi dalam arti luas menurut The Liang Gie (1980:9), Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi mengandung tiga muatan, yakni:

1. Administrasi sebagai seni adalah sebuah proses yang hanya diketahui permulaannya saja, sedang akhirnya tidak ada.

2. Administrasi mengandung unsur-dimensi tertentu yakni adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugastugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan untuk pelaksanaan tugas (termasuk di dalamnya waktu, tempat, materi dan unsur lainnya)

3. Administrasi sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada.

Administrasi dalam arti sempit sebagaimana yang dikatakan oleh Soewarno Handyaningrat (1988:2), sebagai terjemahan dari bahasa Belanda sebagai berikut: “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie*, yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan” (Agustiandini, 2023).

Berdasarkan beberapa definisi administrasi pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan edisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, secara umum adalah suatu bentuk usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

Willam Leffingwell dan Edwin Robinson: Menurut keduanya, pengertian administrasi publik adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan, dan di mana pekerjaan harus dilakukan (Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) & FIA-Universitas Brawijaya, 2024).

Menurut Thoha (2005:53), sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti itu “Teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik”. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan

adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan (Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) & FIA-Universitas Brawijaya, 2024).

Adapun pengertian administrasi publik menurut Harbani Pasolong: Pengertian administrasi publik adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Agustiandini, 2023).

Berdasarkan teori diatas menurut para ahli Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi administrasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pembangunan.

Menurut buku “ADMINISTRASI PEMBANGUNAN” tahun 2024 yang di tulis oleh Dr. Rizky Ilhami, S.Sos., M.AP. Administrasi Pembangunan merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkembang pesat, terutama di negaranegara yang sedang dalam proses pembangunan. Kebutuhan untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, serta ekonomi menjadi penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dalam konteks praktisnya, Administrasi Pembangunan menggabungkan dua kegiatan besar, yaitu Administrasi dan Pembangunan, menjadi satu kesatuan pengertian. Perkembangan Administrasi Pembangunan, baik dalam teori maupun praktiknya, secara erat mengikuti evolusi pemikiran dalam studi administrasi, terutama Administrasi Negara dan

Pembangunan.

Administrasi, dalam pengertian sempit, merupakan serangkaian kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuan, pengarsipan surat, dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan mempermudah akses terhadap informasi tersebut jika dibutuhkan.

Sementara itu, pembangunan memiliki beragam definisi dan pengertian dari berbagai sudut pandang. Alexander (1994) menggambarkan pembangunan sebagai proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pendapat ini sejalan dengan definisi Portes (1976), yang melihat pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap administrasi dan pembangunan, diharapkan upaya pembangunan suatu negara dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Menurut Sondang P Siagian mengatakan administrasi Pembangunan merupakan suatu usaha atau juga rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara serta pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, adapun menurut Bintoro Tjokroamidjojo Pengertian Administrasi Pembangunan adalah suatu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/ pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian sumber daya, dan pengaturan anggaran yang dibutuhkan. Dapat dikatakan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu

proses yang berfokus pada perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan, dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan suatu negara.

Menurut buku “Kebijakan Publik” tahun 2022 yang di tulis oleh Siti Marwiyah Secara umum, administrasi publik dan kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Administrasi publik merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan publik, sekaligus berperan dalam perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada efektivitas administrasi publik dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti administrasi publik sebagai pelaksana kebijakan publik tanpa administrasi publik yang baik, kebijakan yang sudah dirancang tidak akan berhasil diimplementasikan. Selain itu, administrasi publik dalam proses perumusan kebijakan, hal ini membantu pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2.1.3 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang dijadikan panduan dan landasan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas, kepemimpinan, serta tindakan. Istilah ini berlaku dalam konteks pemerintahan, organisasi, sektor swasta, dan juga individu. Berbeda dengan peraturan atau hukum yang dapat mengharuskan atau melarang perilaku tertentu, kebijakan berfungsi sebagai arahan untuk mencapai hasil yang optimal. Secara umum, kebijakan mengacu pada proses pengambilan keputusan krusial dalam sebuah organisasi,

yang meliputi penentuan alternatif seperti prioritas program atau alokasi dana, serta seleksi berdasarkan efek yang dihasilkan. Kebijakan juga bisa diinterpretasikan sebagai instrumen politik, manajerial, finansial, atau administratif dalam mencapai tujuan yang jelas dan terdefinisi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).

Dalam implementasinya, kebijakan memerlukan kerjasama banyak orang dan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai Tindakan yang bertujuan pada proses mencapai tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan. Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri. Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang. Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu (Jann and Wegrich, 2007). Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto Kebijakan adalah mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib yang sedang berlaku.

Adapun pengertian kebijakan menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Satropranoto Kebijakan adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Ernest Utrecht Kebijakan adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota Masyarakat.

Sedangkan Imre Lakatos mengatakan bahwa Kebijakan adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada analisis dan penjelasan tentang hukum yang berlaku dan berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu berdasarkan definisi di atas kebijakan ialah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam beberapa sumber, kebijakan juga diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan.

Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston. Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup lima tahapan, yaitu mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik, mengembangkan proposal kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Adapun definisi yang lain mengenai kebijakan publik yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987:5) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone (1971:18), mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Maka dari itu berdasarkan definisi diatas yang mana kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan pilihan kolektif yang saling tergantung dan dijalankan oleh badan serta lembaga pemerintahan. Pengkajian masalah penelitian harus berbasis teori yang relevan dengan variabel untuk menghasilkan temuan yang konsisten dengan pengujian hipotesis yang ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan

publik memiliki peran krusial dalam masyarakat, khususnya dalam mengatur perilaku individu dan kelompok demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut Buku “Implementasi Kebijakan Publik” Tahun 2006 yang ditulis oleh Tachjan. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Kebijakan publik adalah keputusan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan tersebut agar tujuan kebijakan dapat terwujud secara nyata. Keberhasilan implementasi sangat menentukan efektivitas kebijakan publik dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.1.4 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahap akhir dalam proses kebijakan publik yang melibatkan eksekusi keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Fokus implementasi kebijakan publik adalah pada penerapan keputusan tersebut secara efektif dan efisien di dalam masyarakat. Dampak dari konteks implementasi baru akan terlihat setelah kebijakan itu diterapkan.

Implementasi kebijakan menurut Roy V. Salomo adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Sedangkan menurut Wahab (Tahir, 2014:55) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk

undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Adapun menurut Marilee S. Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 'apa' dari suatu kebijakan.

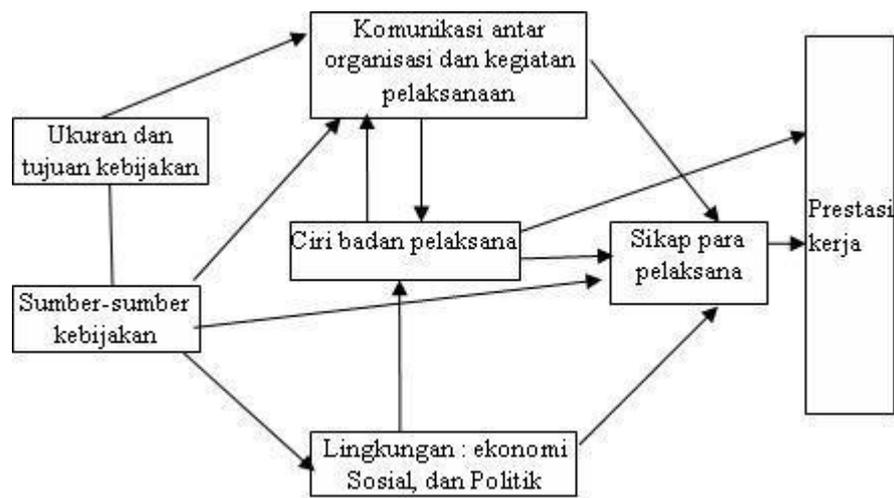
Membahas kebijakan publik, banyak ahli yang mengemukakan berbagai model implementasi kebijakan untuk membantu menjelaskan fenomena yang terkait dengan kebijakan tersebut. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli di antaranya :

Van Meter dan Van Horn mengemukakan sebuah model yang terdiri dari enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja (Winarno, 2014). Model dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah model yang sangat kompleks, dimana satu variable dapat mempengaruhi variable lainnya. Adapun variable tersebut sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan pelaksanaan (*implementors*)

Gambar 1 Teori Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber : www.kertyawitaradya.wordpress.com, diakses pada 8 Mei 2025

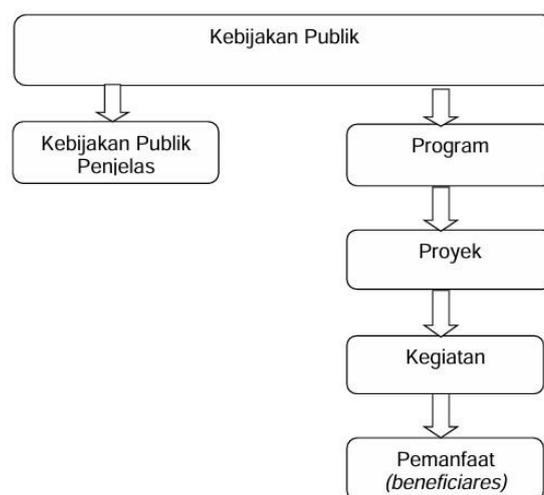
Menurut Handoyo (2012) implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan menjalankan kebijakan, yang ingin dituju kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Sedangkan menurut Riant Nugroho (2017) menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip pokok dalam implementasi kebijakan yang efektif. Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu ada di penuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Tepat Kebijakan, pentingnya untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ingin dipecahkan.
2. Tepat Pelaksanaan, pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah saja. Ada tiga jenis lembaga yang bisa bertindak sebagai

pelaksana, yaitu pemerintah, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat/swasta, serta pelaksanaan kebijakan melalui metode yang diswastakan.

3. Tepat Target, ketepatan target berhubungan dengan tiga hal. Pertama, kita perlu memastikan apakah target yang diintervensi sudah sesuai dengan rencana, kedua apakah terdapat tumpang tindih sebagai intervensi lain, dan ketiga apakah tidak bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada,
4. Tepat Lingkungan, lingkungan kebijakan memegang peranan penting, terutama dalam konteks interaksi antara lembaga perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan dan lembaga terkait lainnya.
5. Tepat Proses, secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses utama, yaitu: (1) *Policy acceptance*, (2) *Policy adoption* dan (3) *Strategic readiness*.

Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan Riant Nugroho



Sumber : Buku Riant Nugroho Tahun 2008 hal 423

Penelitian ini adalah Model Implementasi menurut Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III muncul pada tahun 1980. Dalam karyanya, Edwards memperkenalkan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan pendekatan *top-down*, yang menekankan pentingnya empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

George C. Edwards menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari empat faktor implementasi kebijakan.

1. Komunikasi adalah faktor pertama yang harus ada untuk pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

George C. Edwards III menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah syarat utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika informasi tidak dikomunikasikan secara akurat atau tidak tersampaikan kepada seluruh pelaksana kebijakan, maka akan menimbulkan kesalahan interpretasi yang pada akhirnya berujung pada kegagalan pelaksanaan.

Teori ini diperkuat oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan bergantung pada kejelasan isi

kebijakan, keakuratan komunikasi antara pengambil keputusan dan pelaksana, serta tingkat konsistensi instruksi yang diberikan. Jika ada distorsi informasi, maka pelaksana tidak akan memahami dengan benar maksud dari kebijakan tersebut.

Dalam praktiknya, komunikasi tidak hanya menyangkut penyampaian informasi dari atas ke bawah (top-down), tetapi juga perlu mencakup komunikasi dari bawah ke atas (bottom-up) agar pelaksana di lapangan dapat memberikan umpan balik, menyampaikan kendala, serta mengusulkan penyesuaian kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi realitas di lapangan. Oleh karena itu, mekanisme komunikasi dua arah menjadi sangat penting dalam memastikan implementasi berjalan secara efektif.

2. Sumber daya mencakup semua faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan. Implementasi akan tidak efektif, jika sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan lainnya.

Sumber daya merupakan fondasi utama dari keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut George C. Edwards III, kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal tanpa adanya sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup aspek anggaran, tenaga manusia, sarana dan prasarana, serta informasi yang dibutuhkan.

Grindle (1980) mengemukakan bahwa banyak kebijakan yang pada dasarnya sudah dirancang dengan baik, tetapi gagal di tahap pelaksanaan karena terbatasnya sumber daya. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan jalan yang ambisius akan sulit terwujud jika tidak didukung dengan dana yang cukup, alat berat yang memadai, serta tenaga kerja yang kompeten.

Selain itu, sumber daya juga mencakup waktu. Banyak kebijakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan jika pelaksanaan melewati tenggat waktu tersebut, maka keberhasilan kebijakan dapat terancam. Pengelolaan sumber daya yang efisien, transparan, dan tepat sasaran menjadi kunci agar kebijakan publik bisa diimplementasikan sesuai harapan.

3. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Edwards berargumen bahwa jika para pelaksana tidak memiliki disposisi yang baik seperti kesediaan untuk melaksanakan kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

Disposisi merupakan faktor psikologis dan sikap dari pelaksana kebijakan terhadap substansi kebijakan yang dijalankan. George C. Edwards III menekankan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen, pemahaman, dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tanpa adanya sikap positif dari pelaksana, kebijakan akan cenderung dijalankan secara tidak maksimal bahkan bisa diabaikan.

Ripley dan Franklin (1986) menggarisbawahi bahwa pelaksana kebijakan bukanlah aktor yang pasif. Mereka memiliki penilaian subjektif terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Jika pelaksana merasa bahwa kebijakan tidak realistis, membebani, atau tidak memberikan dampak nyata, maka motivasi untuk menjalankannya pun akan menurun.

Disposisi ini sangat erat kaitannya dengan budaya organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang demokratis, transparan, dan memberi ruang partisipasi kepada pelaksana akan mendorong munculnya sikap antusias dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan otoriter dan birokrasi yang kaku dapat meruntuhkan semangat pelaksana.

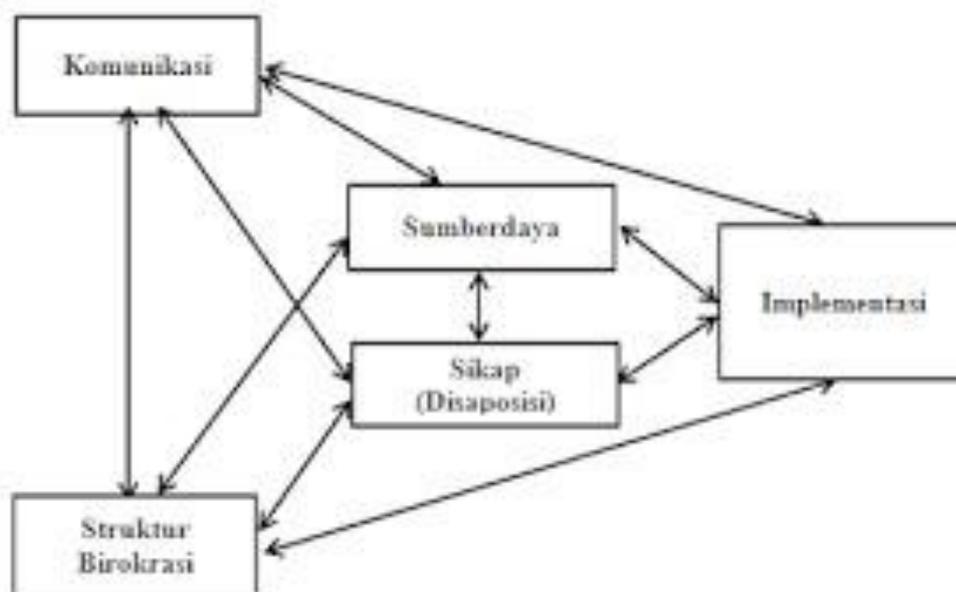
4. Struktur birokrasi adalah faktor terakhir yang berpengaruh pada implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia, struktur birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi.

Struktur birokrasi memainkan peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III menyatakan bahwa struktur organisasi yang kompleks dan terlalu hierarkis dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Prosedur yang panjang, alur koordinasi yang berbelit-belit, serta pembagian wewenang yang tidak jelas sering kali menjadi penghambat utama dalam birokrasi pemerintah.

Max Weber (1947) menjelaskan bahwa birokrasi yang ideal adalah yang berdasarkan rasionalitas hukum, memiliki pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, aturan dan prosedur formal, serta rekrutmen berdasarkan kompetensi. Birokrasi yang efisien justru akan mempercepat pelaksanaan kebijakan karena adanya kejelasan peran, tanggung jawab, dan prosedur standar (SOP).

Namun, dalam praktiknya, banyak birokrasi di negara berkembang justru mengalami overload administratif. Ketidakjelasan SOP, tumpang tindih tugas antar unit, serta koordinasi lintas bidang yang lemah menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak sinkron dan sering mengalami penundaan. Oleh karena itu, pembenahan struktur birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya implementasi kebijakan yang optimal.

Gambar 3 Model Kesesuaian Implementasi Kebijakan George C. Edwards III



Sumber: Dikutip dari George C. Edwards III (1980)

Menurut faktor yang dikembangkan oleh George C. Edwards III, kinerja kebijakan hanya akan berhasil jika ada kesesuaian antara empat faktor penting dalam implementasi kebijakan. faktor pertama yang harus ada untuk pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Menurut Edwards, komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, sumber daya mencakup semua faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan.

Edwards berargumen bahwa jika para pelaksana tidak memiliki disposisi yang baik seperti kesediaan untuk melaksanakan kebijakan, faktor terakhir yang berpengaruh pada implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia, struktur birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, output keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edwards III sangat bergantung pada interaksi antara keempat faktor ini. Memahami hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat membantu pembuat kebijakan merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan mereka

2.1.5 Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, yang pada gilirannya memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Pembangunan jalan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses yang lebih baik ke pasar dan layanan penting, masyarakat dapat mengangkut barang dagangan dengan lebih efisien, serta mendapatkan akses ke pendidikan dan kesehatan.

Penentuan lokasi pembangunan jalan yang tepat menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu melakukan pemetaan yang cermat agar proyek infrastruktur dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Subang Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan kebijakan untuk membangun dan memperbaiki kondisi jalan karena kondisi jalan di Kabupaten Subang belum menjadi jalan yang baik atau rusak. Implementasi Kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Subang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan harapan dapat menjadi jalan yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari program jalan oleh dinas.

Pengertian jalan berdasarkan status administrasi adalah pengelompokan jalan menurut kewenangan pengelolaannya yang diatur oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Jenis-jenis jalan berdasarkan status administrasi meliputi :

1. Jalan Nasional

Jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jalan ini menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, dan termasuk jalan tol. Ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri PUPR.

2. Jalan Provinsi

Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jalan ini menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, serta jalan strategis provinsi. Penetapan ruas jalan provinsi dilakukan oleh gubernur.

3. Jalan Kabupaten

Jalan yang dikelola pemerintah kabupaten, menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan, antar kecamatan, pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh bupati.

4. Jalan Kota

Jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan permukiman, serta antar permukiman di dalam kota. Ruas jalan kota ditetapkan oleh walikota.

5. Jalan Desa

Jalan yang dikelola pemerintah desa, menghubungkan kawasan dan antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan primer di kawasan perdesaan.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka. Kerangka berpikir berfungsi sebagai landasan berpikir yang membantu dalam mengembangkan kajian. Tujuan membuat kerangka berpikir adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian, membantu dalam mengembangkan kajian dan menjelaskan proses penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Subang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Subang memiliki tujuan strategis yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Subang. Dengan infrastruktur jalan yang baik, akses antara daerah terpencil dan pusat-pusat perekonomian dapat diperbaiki, sehingga memudahkan transportasi barang dan jasa. Pembangunan jalan diharapkan dapat memperlancar arus distribusi produk pertanian dan hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini akan menurunkan biaya transportasi, sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif di pasar. Infrastruktur yang baik tidak hanya berfungsi untuk transportasi, tetapi juga meningkatkan layanan masyarakat di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edwards III yang menekankan pentingnya empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Output pada penelitian dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Subang karena mendapatkan jalan yang layak dan baik dari implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas jalan.

Feedback atas pembangunan infrastruktur jalan yang sudah bagus dan optimal di Kabupaten Subang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam konektivitas, efisiensi ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kualitas hidup